

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Ketergantungan pada Sektor Industri
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Banten 2014

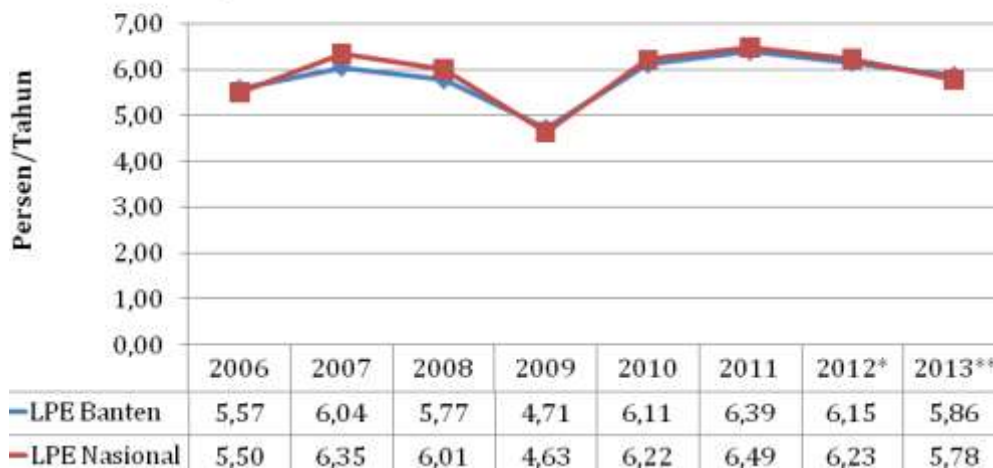
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Banten memiliki posisi geografis yang mendukung pada berkembangnya kegiatan perekonomian daerah. Perekonomian Provinsi Banten selama periode 2006-2013 memiliki kinerja yang hampir sama dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama periode tersebut sebesar 5,83 persen per tahun, sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDRB 33 provinsi) sebesar 5,90 persen per tahun pada periode yang sama (Gambar 1). Kontribusi PDRB Provinsi Banten dalam pembentukan output nasional pada tahun 2013 sebesar 3,16 persen. Dari perspektif wilayah, kontribusi PDRB Banten terhadap output wilayah Jawa Bali sebesar 5,37 persen. Dari sisi besarnya, perekonomian Provinsi Banten menduduki posisi terendah kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

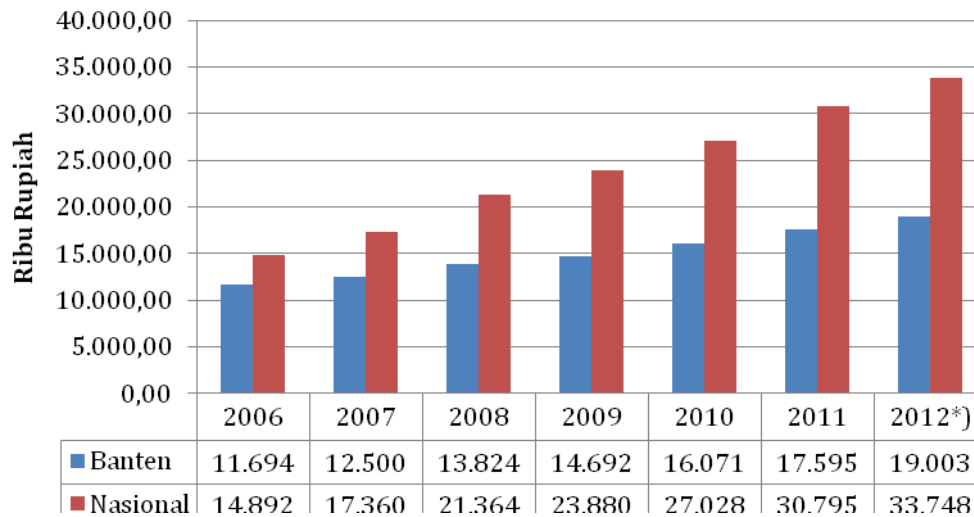


Sumber: BPS, 2013

Walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi setara dengan laju pertumbuhan nasional, kesenjangan pendapatan perkapita di Provinsi Banten cukup tinggi. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Provinsi Banten dan PDB nasional sebesar 78,52 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 56,31 persen (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku

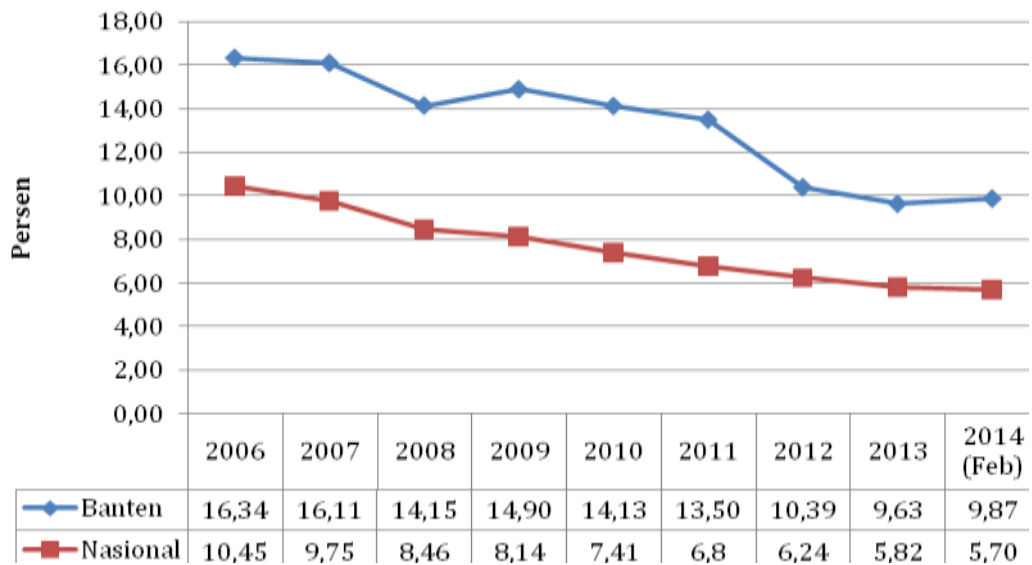


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten selama 2006-2013 berkurang sebesar 6,71 persen (Gambar 3). Pada tahun 2006 tingkat pengangguran daerah tinggi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengindikasikan industri penyedia lapangan kerja di Banten sangat sensitif terhadap gejolak harga BBM. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten lebih tinggi daripada nasional karena lemahnya pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja, yaitu sektor unggulan yang memiliki keterkaitan hulu hilir dan atau industri unggulan yang bersifat padat karya, serta lemahnya kemampuan wirausaha yang dimiliki oleh angkatan kerja. Diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti industri pengolahan, pertanian perdagangan, jasa. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

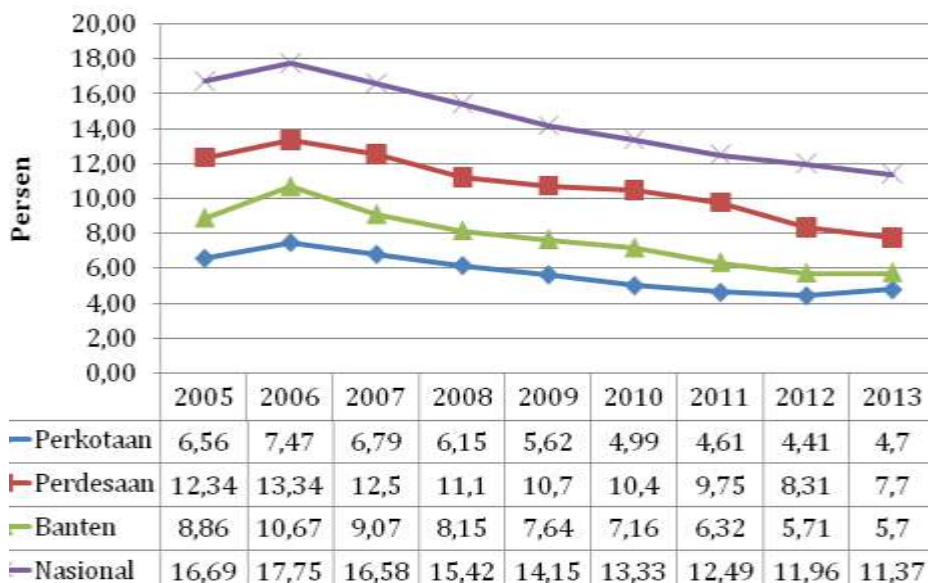


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Walaupun tingkat pengangguran relatif tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, tingkat kemiskinan Banten berhasil ditekan dan lebih rendah dibandingkan nasional, terutama di perkotaan. Hal ini mengindikasikan tenaga kerja yang ada merupakan tenaga kerja yang berkualitas. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 10,67 persen menjadi 5,74 persen (Gambar 4).

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

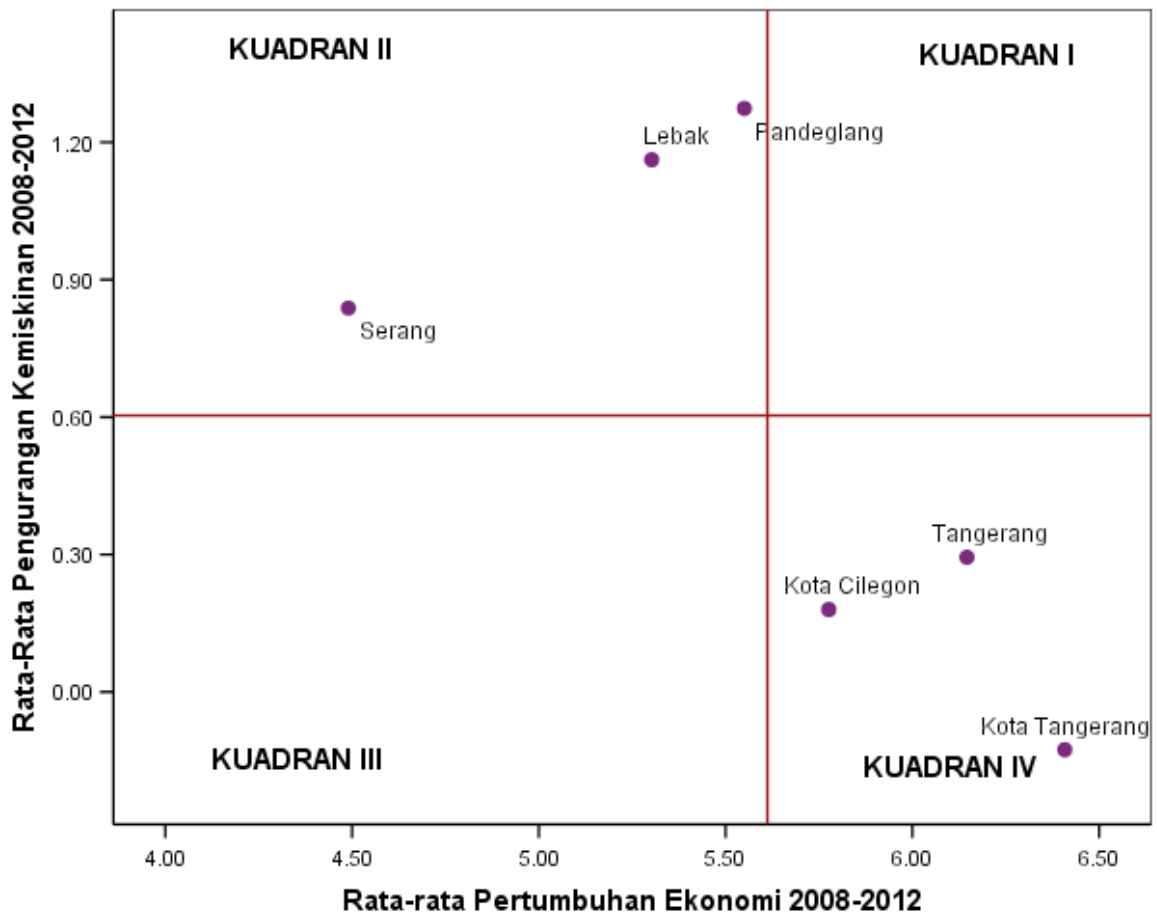
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Banten menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, tidak ada kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. *Kedua*, Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah

adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti industri manufaktur, pertanian, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, tidak ada kabupaten dan kota di Banten yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*).

Keempat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

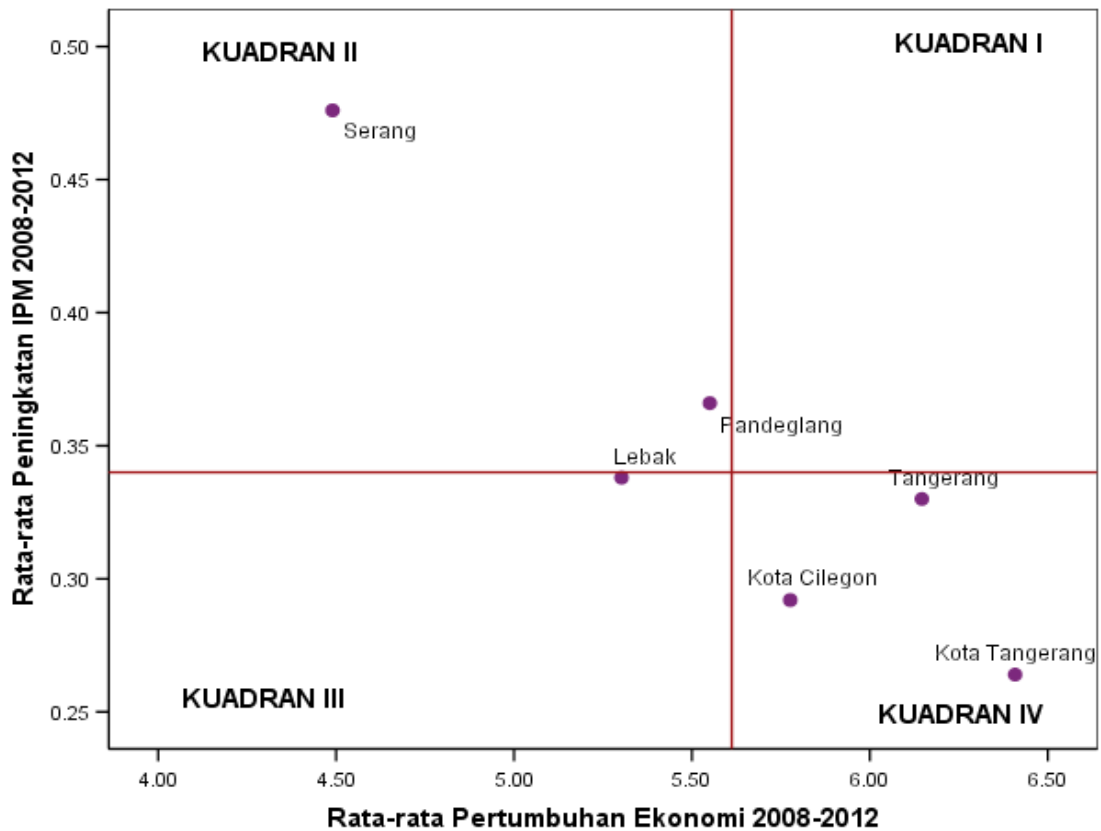
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Banten berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, tidak ada kabupaten dan kota di Banten yang terletak pada Kuadran I dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Pada kuadran ini pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Serang dan Pandeglang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi seperti Industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Lebak terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



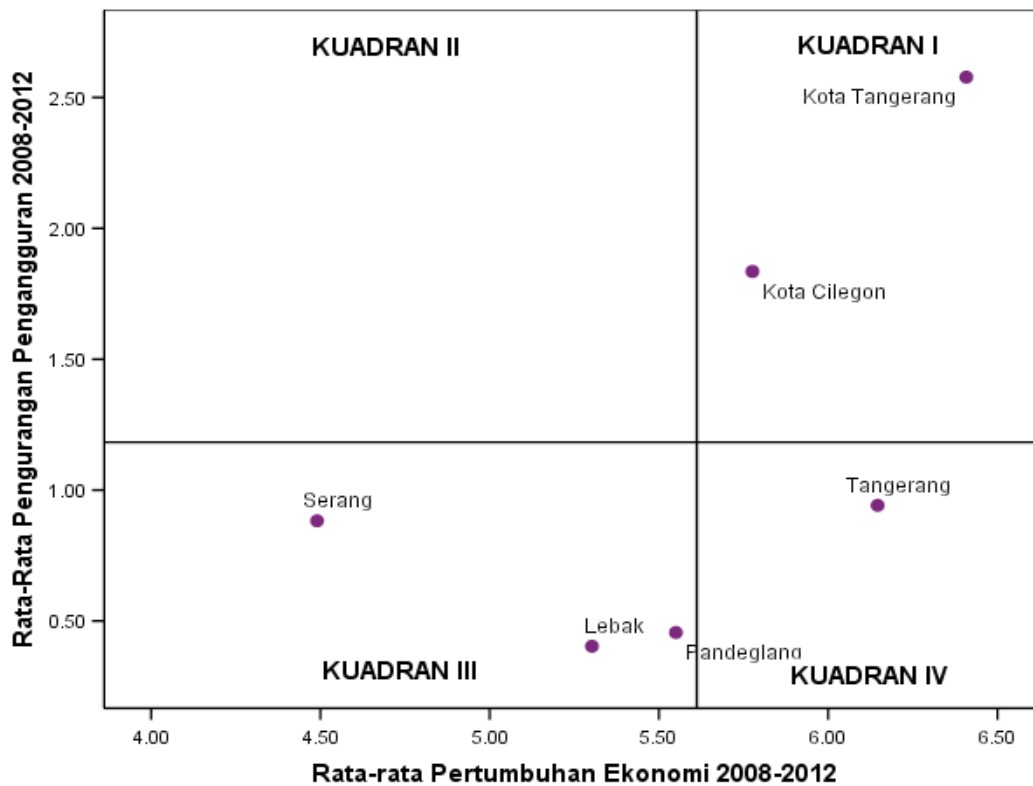
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Banten menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Cilegon dan Kota Tangerang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan dan jasa.

Kedua, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran II dengan kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). *Ketiga*, Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Pandeglang yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



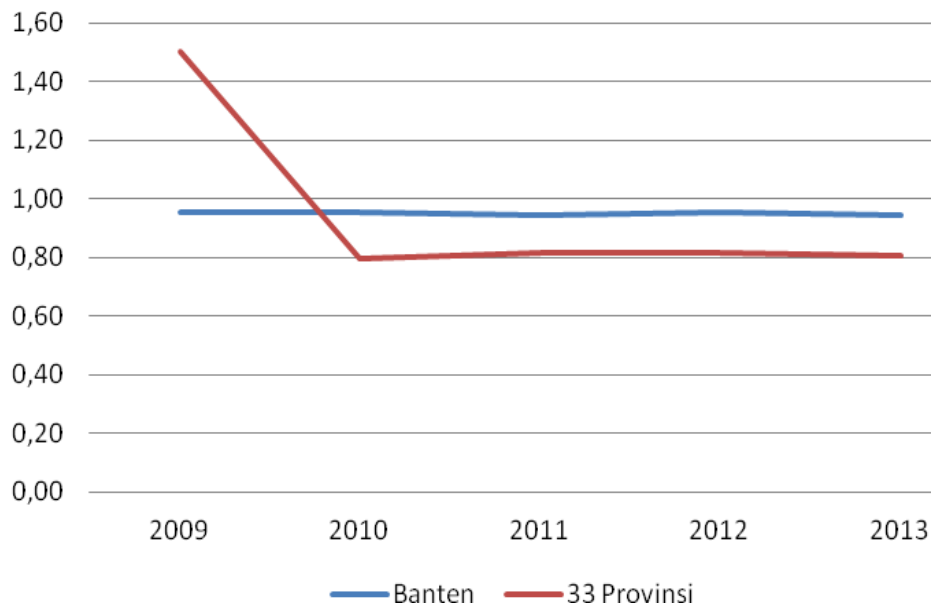
Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Keempat, Kabupaten Tangerang yang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti industri pengolahan, pertanian perdagangan, jasa. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Banten yang ditunjukkan dengan nilai *indeks wiliamson* dari tahun 2007-2012 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Banten berada di atas nasional dengan kecenderungan semakin meningkat (Gambar 8). Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Banten adalah struktur perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten terkait dengan perkembangan masing-masing kabupaten dan kota di provinsi ini. Perbedaan kegiatan ekonomi antarkabupaten dan kota berakibat pada kecilnya nilai tambah yang dihasilkan di masing-masing daerah sehingga terjadilah ketimpangan.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi Banten Tahun 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Banten cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Tingginya pendapatan per kapita di Kota Cilegon didukung oleh keberadaan industri pengolahan di daerah ini. Perbedaan faktor produksi pada perekonomian masing-masing daerah turut menentukan perkembangan nilai PDRB per kapita. Ketersediaan jumlah tenaga kerja, modal, teknologi di Kota Cilegon turut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah ini karena akan meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang secara langsung berdampak pada pendapatan perkapita.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Pandeglang	5.515	6.175	6.734	7.552	8.115	9.010
Lebak	5.229	5.770	6.333	6.995	7.527	8.185
Tangerang	8.977	9.758	11.286	12.227	13.533	14.615
Serang	7.295	7.858	8.301	9.013	9.856	10.754
Kota Tangerang	23.872	25.306	28.184	31.480	34.454	36.937
Kota Cilegon	64.057	70.333	76.398	83.064	89.616	97.152
Kota Serang	-	7.912	8.778	9.743	10.682	11.652
Kota Tangerang Selatan	-	-	8.182	8.944	9.974	10.883
BANTEN	12.500	13.825	14.692	16.072	117.596	19.003

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Industri

Struktur perekonomian Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kontribusi sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 45, 58 persen pada pembentukan PDRB Provinsi Banten (Tabel 2). Sektor pertanian di Provinsi Banten banyak dikembangkan di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang. Sektor industri pengolahan yang menjadi unggulan provinsi ini banyak tersebar di Kabupaten Tangerang, yang sekaligus turut mendukung sektor industri di Provinsi Banten.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	7,98	7,31
2.	Pertambangan	0,10	0,10
3.	Industri Pengolahan	45,58	47,63
4.	Listrik, Gas, Air Minum	3,77	3,60
5.	Konstruksi	3,73	2,95
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,42	20,48
7.	Angkutan, Telekomunikasi	9,40	9,50
8.	Keuangan	3,91	3,86
9.	Jasa-jasa	6,11	4,58
		100.00	100.00

Sumber: BPS, 2013

Jika ditelusuri lebih jauh, sektor-sektor basis daerah antara lain sektor listrik dan gas, industri pengolahan khususnya industri tanpa migas (tekstil, barang kulit dan alas kaki, barang kayu, kertas, pupuk, logam dasar besi dan baja), angkutan, pos dan telekomunikasi, serta perdagangan dan restoran. Sektor-sektor tersebut ini memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) di atas satu yang mengindikasikan keunggulan komparatif daerah (Tabel 3).

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,54	0,54	0,58	0,57	0,58
a. Tanaman Bahan Makanan	0,62	0,61	0,65	0,66	0,66
b. Tanaman Perkebunan	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30
c. Peternakan	1,00	1,02	1,09	1,09	1,09
d. Kehutanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
e. Perikanan	0,34	0,37	0,37	0,37	0,37
2. Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
b. Pertambangan Bukan Migas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
c. Penggalian	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
3. Industri Pengolahan	1,99	1,99	1,97	1,94	1,90
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	2,18	2,17	2,13	2,10	2,03
4. Listrik, Gas & Air Bersih	4,89	4,45	4,77	4,76	4,77
a. Listrik	5,41	5,26	5,30	5,24	5,28
b. Gas	6,01	4,37	5,48	5,59	5,45
c. Air Bersih	0,70	0,71	0,73	0,76	0,77
5. Konstruksi	0,40	0,41	0,41	0,43	0,43
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,02	1,07	1,08	1,08	1,11
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,05	1,11	1,11	1,10	1,14
b. Hotel	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
c. Restoran	1,11	1,13	1,18	1,23	1,24
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,98	0,93	0,91	0,92	0,92
a. Pengangkutan	1,77	1,79	1,85	1,91	1,97
1). Angkutan Rel	0,87	0,92	0,94	1,02	1,12
2). Angkutan Jalan Raya	1,76	1,84	1,95	2,06	2,11
3). Angkutan Laut	1,38	1,24	1,22	1,21	1,20
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
5). Angkutan Udara	2,95	2,93	2,87	2,84	2,97
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,27	1,23	1,22	1,22	1,24
b. Komunikasi	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,35	0,38	0,39	0,39	0,39
a. Bank	0,29	0,34	0,34	0,34	0,35
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estate	0,60	0,63	0,64	0,64	0,65
e. Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
9. Jasa-jasa	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48
a. Pemerintahan Umum	0,50	0,52	0,51	0,52	0,55
b. Swasta	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,45	0,47	0,46	0,48	0,50
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,44	0,43	0,43	0,43	0,44

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Sejalan dengan kontributor terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Wilayah, sektor-sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, jasa-jasa, industri pengolahan, dan keuangan. Selama periode 2010-2014, sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya (Tabel 4). Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	717.535	712.079	-5.456
2	Pertambangan	20.897	47.687	26.790
3	Industri Pengolahan	863.269	1.088.392	225.123
4	Listrik, Gas, Air	12.334	18.323	5.989
5	Bangunan	153.951	243.698	89.747
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	984.513	1.266.512	281.999
7	Angkutan & Telekomunikasi	354.674	325.286	-29.388
8	Keuangan	105.460	297.410	191.950
9	Jasa-Jasa	602.082	938.706	336.624
	Total	3.814.715	4.938.093	1.123.378

Sumber : BPS, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi penggunaan, pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2013 adalah ekspor dan impor (Tabel 5). Provinsi Banten merupakan daerah industri sehingga kegiatan ekspor dan impor dominan di daerah ini.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	44,44	16,83
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,59	54,39
3.	Konsumsi Pemerintah	5,13	1,52
4.	PMTB	36,55	9,23
5.	Perubahan Stok	0,50	0,19
6.	Ekspor	89,29	54,39
7.	Impor	76,50	36,53
	Total	100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Peran impor yang tinggi dapat bernilai positif jika lebih banyak digunakan untuk investasi. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pada tahun 2013, ekspor dan impor masih tetap merupakan sumber utama pertumbuhan daerah.

Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Sementara itu, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat, padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi dalam perekonomian daerah.

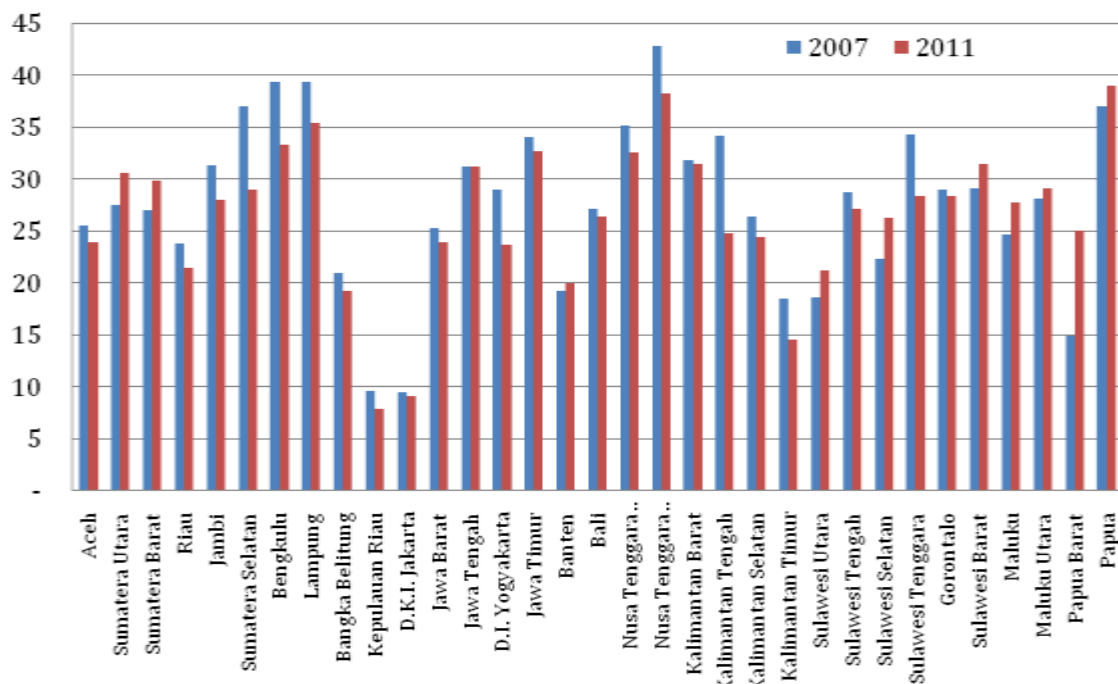
Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Banten secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian,

dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Perkembangan tingkat pekerja yang kurang berkualitas di Provinsi Banten persentasenya sedikit meningkat dari tahun 2007 ke 2011, yaitu dari sebesar 19,23 persen pada tahun 2007 menjadi sebesar 19,92 persen pada tahun 2011. Persentase ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 27,60 persen pada tahun 2011. Dibandingkan wilayah lainnya di Jawa, jumlah pengangguran kurang berkualitas di Banten menempati posisi kedua terendah setelah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Ketersediaan jaringan jalan di Provinsi Banten sesungguhnya cukup baik apabila diukur dari kerapatan jalan (panjang jalan per kilometer persegi) dan lebih baik dari rata-rata nasional (Tabel 6). Provinsi Banten dilayani jaringan jalan sepanjang 6.456 km, terdiri atas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

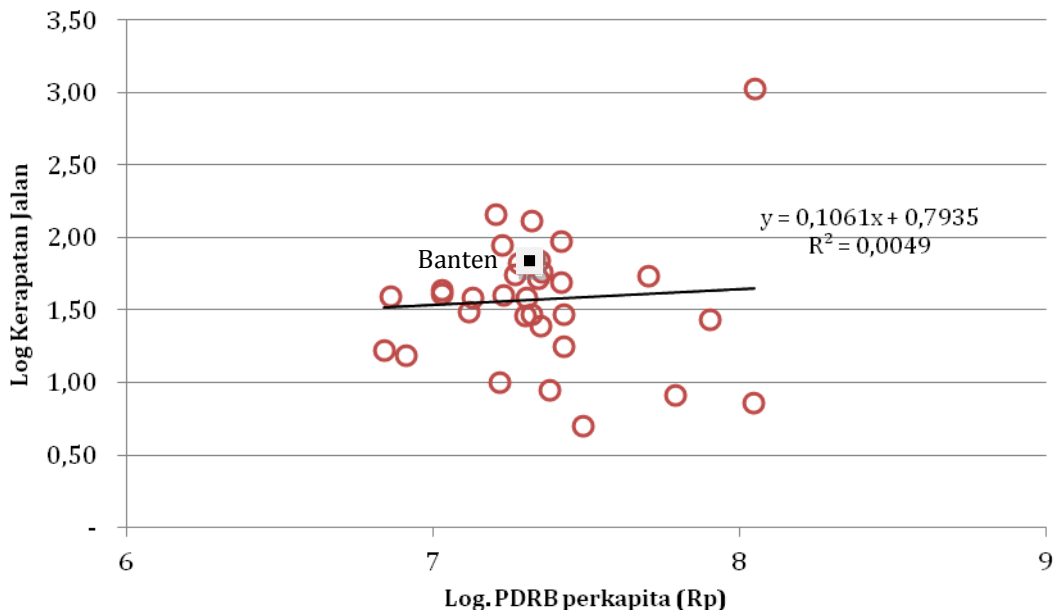
Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
29	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan wilayah seluruh provinsi di Indonesia, posisi Banten menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Provinsi yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu negara sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi Banten berada di atas kurva, berarti secara kuantitas kerapatan jalan di Banten di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dari segi kualitas kualitas, kondisi jalan di Banten relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan yang beraspal di Banten sudah mencapai 81 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Banten	724	81	96	11	67	8	2	0	2.001	100
Jawa Bali	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

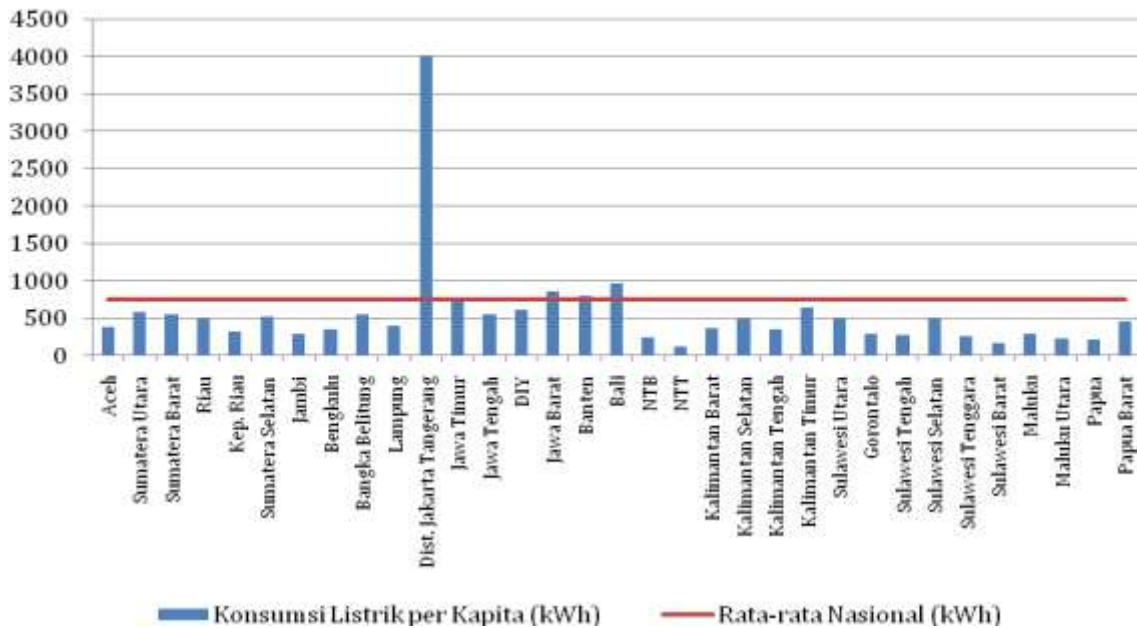
Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Banten berada di atas rata-rata nasional dan merupakan yang tertinggi ketiga di wilayah Jawa setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Gambar 11).

Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 146 negara, terlihat hubungan yang positif antara

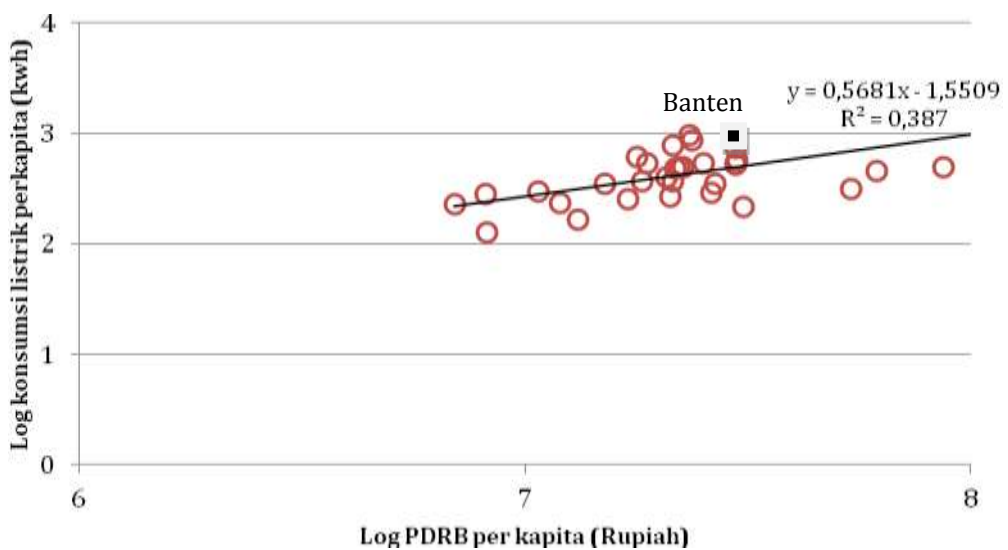
PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Negara maupun wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Dengan menggunakan perbandingan internasional, konsumsi listrik di Banten juga lebih tinggi dibandingkan provinsi dengan pendapatan per kapita setara, menunjukkan infrastruktur listrik bukan merupakan masalah bagi Provinsi Banten.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

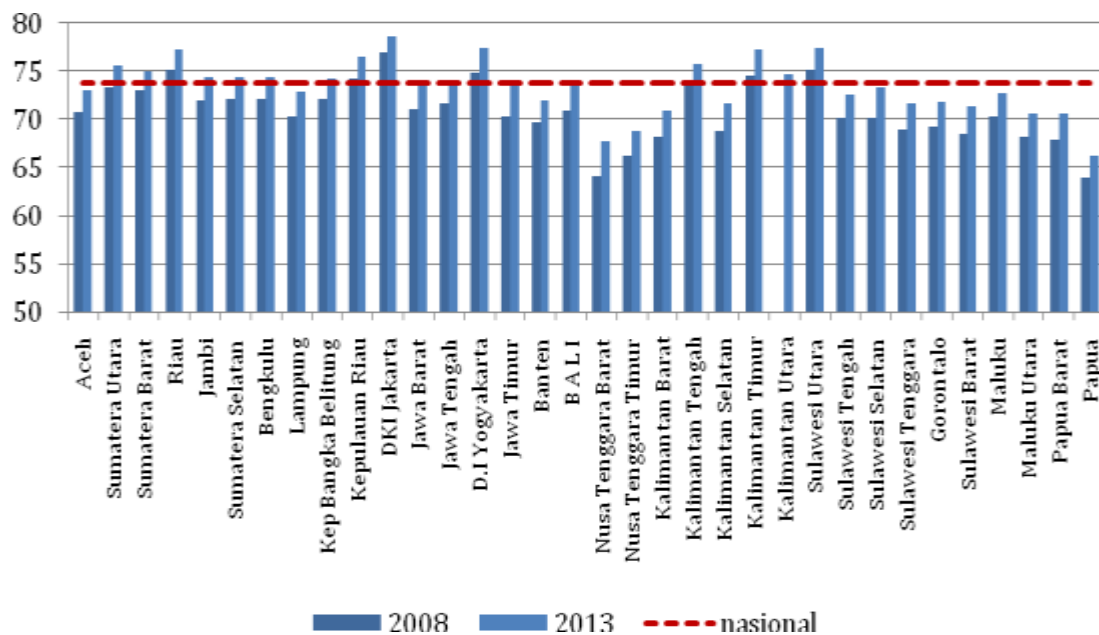


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

IPM Banten menduduki peringkat ke-24 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 71,90. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 64,6 tahun pada tahun 2008 menjadi 65,47 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Banten meningkat dari 8,1 tahun pada 2008 menjadi 8,61 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Banten pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,6 menjadi 96,87 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 94,14.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	2.073.699	2.093.090	19.391
2	SMTP	781.685	948.412	166.727
3	SMTA Umum	1.131.147	1.703.227	572.080
5	Diploma I/II/III/Akademi	137.945	206.318	68.373
6	Universitas	200.979	528.045	327.066
Total		4.325.455	5.479.092	1.153.637

Sumber: BPS, 2014

Perbaikan kualitas sumber daya manusia di Banten tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 33,99 persen pada tahun 2008 menjadi 44,89 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis industri.

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Banten lebih rendah dibanding pinjaman yang dikururkan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR semakin meningkat dan mencapai 1,79 pada tahun 2013 (Tabel 9) . Hal ini mengindikasikan kegiatan investasi di Provinsi Banten ditentukan oleh dana dari luar. Dengan kata lain, pembangunan di Banten dibiayai oleh tabungan masyarakat luar daerah.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Banten	104.185	186.430	1,79	0,71
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0,84	0,42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

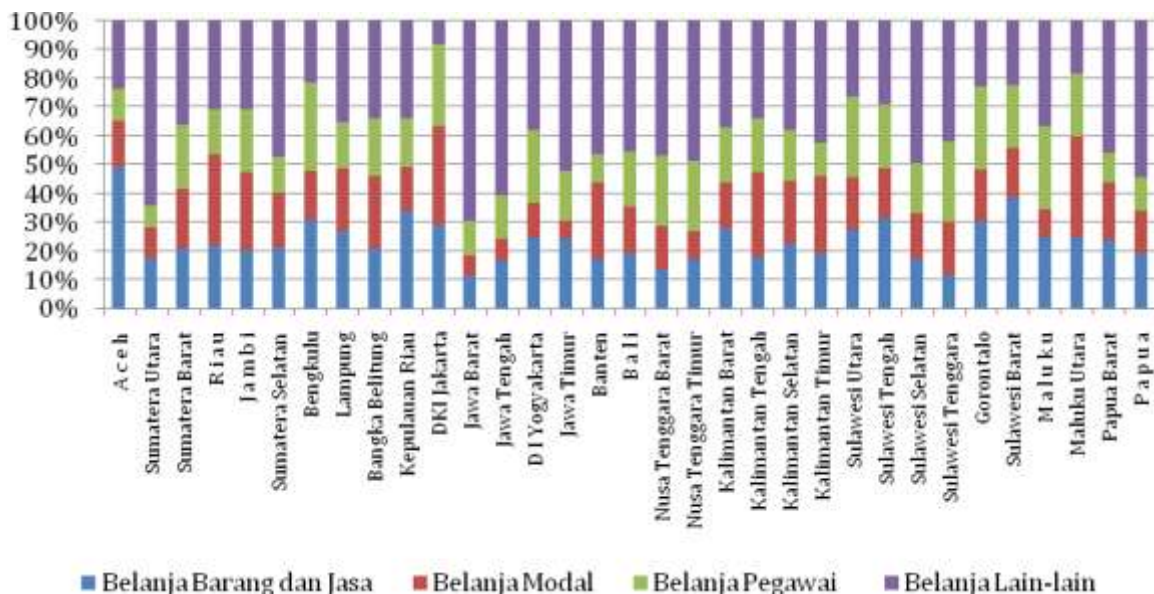
Sumber: BPS, 2013

Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Meski secara umum porsi investasi pemerintah relatif kecil dibandingkan dengan porsi investasi oleh swasta, namun perannya sangat penting dan tidak tergantikan. Hal ini karena investasi pemerintah umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non-excludable* dan atau *non-rivalry*. Pada sektor-sektor seperti ini swasta tidak tertarik untuk membangunnya. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya. Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Terkait dengan hal ini komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik masih rendah. Hal ini terlihat dari relatif rendahnya rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja (pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Banten). Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dan belanja pegawai dalam total belanja APBD di Provinsi Banten masing-masing besarnya 24,65 persen dan 10,09 persen (Gambar 14).

Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa

semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, di antaranya prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Jawa. Realisasi percepatan pengembangan ekonomi Jawa diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Banten tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

- Sasaran pertumbuhan ekonomi Banten dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 4,9 – 7,7 persen dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten akan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian global. Kinerja ekspor akan semakin meningkat yang juga didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan di Banten.
- Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Banten harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 5,3 – 3,7 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 5,74 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Banten harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,04 poin persentase atau 0,34 poin persentase per tahun.
- Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Banten akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Banten maupun lingkungan eksternal. Perlambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri unggulan daerah;
- b. Pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Peningkatan jumlah produk industri pengolahan berkualitas ekspor;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) dan kesehatan;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah

